

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan negara yang memiliki peran penting bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Tanggung jawab negara Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu dasar utama pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dibidang Program Keluarga Harapan (PKH). Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan yang dimaksud yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sehingga masalah kemiskinan berpengaruh buruk terhadap banyak aspek kehidupan dan menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan putus sekolah. Dengan

kondisi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan yang dapat mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin. Dalam rangka pembangunan bangsa dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah pusat memberlakukan PKH sejak tahun 2007 di berbagai wilayah, dalam Permensos I tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 1 berbunyi:

“Program Keluarga Harapan (PKH) yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terdapat program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH”.

Negara Indonesia telah melaksanakan PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin. PKH membuka akses bagi keluarga kurang mampu terutama Ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia dilingkungan mereka. Bukan itu saja manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kehidupan mereka yang menerima manfaat.

Pelaksanaan program keluarga harapan mulai di berlakukan sejak tahun 2013 di Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu desa yang terletak dikecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Desa Juhar. Kondisi ekonomi di Desa Juhar sebelum diterapkan Program Keluarga Harapan masih dikatakan belum sejahtera hal ini bisa dilihat dari sebagian besar masyarakat desa sumber

pendapatannya dari pertanian dan buruh yang menjadi ciri khas keluarga miskin. Dengan ini bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih dikatakan rendah karena tingkat pendapatan yang tidak pasti, hanya ditentukan dengan hasil panen yang terkadang tidak memenuhi kebutuhan. Dengan permasalahan ekonomi di Desa Juhar Pemerintah Desa memberlakukan Program Keluarga Harapan untuk menanggulangi kemiskinan. Program PKH di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah yang dimulai dari tahun 2013 sampai saat ini masyarakat terbantu untuk meningkatkan kesejahteraannya terhadap kesehatan dan pendidikan. Berikut ini merupakan data jumlah penerima PKH di Desa Juhar.

Tabel 1.1

## Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Juhar

No	Tahun	Jumlah KPM
1	2013	150
2	2014	150
3	2015	160
4	2016	200
5	2017	210
6	2018	220
7	2019	230
8	2020	235
9	2021	235

Sumber: Kantor Kepala Desa, 2021

Pada tabel diatas jumlah Keluarga Penerima Manfaat dari tahun 2013 dan tahun 2014 di Desa Juhar sebanyak 150 KPM. Hal tersebut tidak mengalami peningkatan, namun pada tahun 2015 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan penerima manfaat PKH dengan jumlah 235 KPM. Berdasarkan penambahan data penerima manfaat PKH maka dapat dikatakan bahwa meningkatnya jumlah

masyarakat miskin di Desa Juhar untuk itu pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan program PKH di Desa Juhar untuk mengurangi masyarakat yang kurang mampu.

Program ini tidak terlepas dari berbagai masalah. Permasalahan yang sering terjadi di Desa Juhar disebabkan oleh beberapa hal, yaitu dalam penyaluran PKH sebagian masyarakat mengkritik penerapan PKH, seperti kurangnya informasi dan transparan terkait apa dan bagaimana PKH dan siapa saja penerima manfaat PKH. Transparansi itu penting dilakukan oleh pelaksana PKH di Pemerintah Desa dan Pendamping PKH. Kemudian adanya kesalahan yang menyalahgunakan dana PKH yang diberikan kepada peserta PKH untuk hal-hal tidak di anjurkan dalam program PKH, selain itu permasalahan lain adalah tidak tepat sasaran dalam melakukan pendataan keluarga yang kurang mampu, karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan dana PKH sebaliknya masyarakat mampu mendapatkan dana PKH tersebut.

Berdasarkan hal diatas maka Pemerintah desa dalam menerapkan Program Keluarga Harapan seharusnya dilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan agar semua kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Dengan permasalahan yang telah diamati oleh peneliti terkait dengan Program Keluarga Harapan Di Desa Juhar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pelaksana Program

Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Juhar?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Eektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Juhar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa Juhar, khususnya dalam melakukan penyaluran Program Keluarga Harapan.

### 2. Bagi Penulis

Sebagai studi perbandingan antara ilmu yang selama ini telah dipelajari pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan dan menambah pengetahuan serta kemampuan penulis dalam merekam, menganalisis dan mencari jalan keluar terhadap sebuah permasalahan.

### 3. Bagi Akademik

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.

### 4. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Kebijakan Publik

Dalam memahami implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu akan memahami secara singkat yang dimaksud dengan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah ketentuan dalam sistem politik dalam guna mengelola suatu masalah publik. Menurut Arenawaty (2016:108) kebijakan adalah “tindakan atau kegiatan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apapun dalam memecahkan masalah”. Pemerintah dapat merencanakan serangkaian kegiatan tindakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memperimbangkan segi ekonomis, social, dan politis. Kemudian Menurut Dye (dalam Subarsono 2021:2) kebijakan publik adalah

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Masalah-masalah publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan disamping itu dihendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Maka dari itu pemerintah dapat melakukan tindakan kepada masyarakat dan

tindakan tersebut bentuk dari suatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

## 2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Masalah-masalah publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan disamping itu dihendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Maka dari itu pemerintah dapat melakukan tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut bentuk dari suatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, (2020:21) implementasi kebijakan artinya “kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka kebijakan yang telah dirumuskan akan sia sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik. Tindakan tersebut adalah berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Oleh karena itu maka yang menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahamai apa yang nyata terjadi



sesudah suatu program. Menurut Grindle (dalam Tresiana dan Duadji 2019:23) pengertian Implementasi menyatakan “bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses Implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran”.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan hasil kegiatan pemerintah. Dalam membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan. George C. Edward III mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri-sendiri, namun dapat saja saling terkait satu sama lain, variabel tersebut dapat dijalankan sebagai berikut:

## 1 Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksanaan harus mempengaruhi betul apa yang harus dilakukannya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ini. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun media elektronik.

## 2 Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementer. Tampak sumberdaya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.

Sumberdaya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen diatas kertas  
semata.

### 3 Disposisi

Disposisi yang dimaksud disini ialah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti: komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus kandas ditengah jalan, ataupun salah sasaran karena perilaku dari implementor kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor kebijakan sangat diperlukan.

### 4 Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (Standard Operational Procedures). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.

### 2.3 Teori Kemiskinan

Kemiskinan masalah sosial yang senantiasa selalu hadir ditengah masyarakat, khususnya di negara berkembang. Masalah kemiskinan begitu menarik untuk dibahas diberbagai kalangan, baik para akademis maupun para praktisi. Kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Dari definisi tersebut diperoleh bahwa kemiskinan merupakan seseorang yang tidak menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan seperti tidak memenuhi kebebasan, hidup layak, kesehatan dan pendidikan. Menurut Suharto (dalam Agus 2014:9) menyatakan bahwa

kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan actual dari masa kemasa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

Nugroho dan Dahuri (2012) kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif disuatu wilayah dimana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kehidupan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

Kebijakan dan program pembangunan yang semestinya bisa digulirkan dengan adil dan merata, kemungkinan malah akan melahirkan efek samping pembangunan yang merugikan. Selama ini banyak bukti program pengentasan

kemiskinan yang lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi dan hanya dilakukan dengan logika. Pada akhirnya tidak melahirkan pemikiran sosial masyarakat yang makin lebar karena tidak menjamin distribusi kesejahteraan yang merata.

Menurut Haungton dan Khandker (2012:157) penyebab-penyebab utama atau paling tidak berhubungan dengan kemiskinan mencakup tiga karakteristik yaitu karakteristik wilayah, masyarakat, serta rumah tangga dan individu. Karakteristik wilayah mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, kualitas pemerintah, serta hak miliki dan pelaksanaannya. Sementara karakteristik masyarakat mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik), layanan pendidikan dan kesehatan. Aspek ekonomi seperti status pekerjaan, jam kerja dan harta benda yang dimiliki. Sejalan dengan Chaniago (2012:200) mengatakan akibat tidak adanya kepekaan terhadap ketimpangan sosial, kebijakan sosial untuk pemerataan yang dibuat pemerintah tidak efektif mencapai sasaran, kecuali keberhasilan yang tampak pada angka-angka statistik yang tidak punya konteks struktural kuantitatif.

Menurut suyanto (2018) kemiskinan merupakan tingkat pendapatan dibawah pendapatan garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan dalam kesejahteraan sosial akan mempersulit terpenuhinya berbagai kebutuhan gizi atau kemampuan untuk tidak sakit, sehingga tidak mengherankan apabila dilingkungan mereka tingkat kematian yang sangat tinggi.

Berbagai paket bantuan permodalan dan bantuan teknologi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, meskipun dimaksud untuk mendongkrak pendapatan mereka. Namun demikian, hasilnya di lapangan acapkali malah berbalikan. Ketika harga beras naik dipasaran, misalnya para petani yang merupakan produsen komoditi utama pangan ini, ternyata justru hanya membayar lebih mahal apa yang mereka hasilkan, sebab yang dihasilkan petani hanya sebatas gabah, yang kemudian harganya naik tajam tatkala sudah diproses menjadi beras oleh pengusaha-pengusaha lokal yang memiliki mesin.

### 2.3.1 Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Dalam memahami kemiskinan yang terjadi dimasyarakat kemiskinan dapat Menurut Matias Siagian (2019) kemiskinan memiliki bentuk bentuk kemiskinan yaitu:

#### 1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memnuhi kebutuhan pokok hidup, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

#### 2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembanguna yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan atau bisa

dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

### 3. Kemiskinan Kultural.

Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, dan lain-lain.

### 4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

## 2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Maipta (2013) bahwa kemiskinan disebabkan oleh dua faktor yaitu:

### 1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna dan sebagainya.

### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata dan lain-lain.

## 2.4 Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan menggambarkan kondisi dalam kehidupan masyarakat baik tingkat ekonomi, lapangan pekerjaan ataupun bebas dari kata kemiskinan. Menurut Fahrudi (2014:8) Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” ini berasal dari bahasa sansekerta ”catera” yang berarti payung. Dalam pengertian ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “Catera”(payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Dengan terpenuhi kebutuhan manusia baik secara materil maupun spritual maka dapat dikatakan sejahtera. Menurut Suharto (2020:49) pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. pengertian tersebut bertujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh bangsa Indonesia.

### 2.4.1 Tujuan Kesejahteraan

Menurut Fahrudi (2014) Kesejahteraan mempunyai tujuan yaitu:

- 1 Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.



- 2 Untuk mencapai penyusuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya misalnya dengan sumber-sumber, meningkatnta dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan

#### 2.4.2 Fungsi Kesejahteraan

Menurut fahrudi (2014) Fungsi-fungsi kesejahteraan antara lain:

##### 1 Fungsi pencegahan

Kesejahteraan ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah baru.

##### 2 Fungsi penyembuhan

Kesejahteraan ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan.

##### 3 Fungsi pengembangan

Kesejahteraan berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pengembangan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

##### 4 Fungsi penunjang

Fungsi ini kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Dengan ini peneliti mencari sumber penelitian terdahulu mengenai PKH.

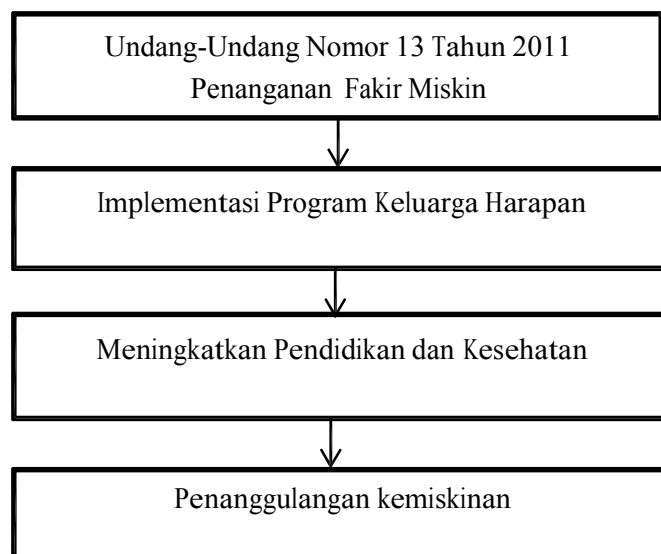
Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Cut Razi Mirsandi dengan judul “implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya”. Metode pengumpulan data dipenelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Razi Mirsandi pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Menurut Cut implementasi PKH di kecamatan Setia melalui beberapa tahapan yang pertama, dimulai dari pertemuan awal, tahap kedua memasukkan data kesistem informasi manajemen, tahap ketiga pembayaran danyang terakhir verifikasi komitmen. Kemudian implementasi PKH dikecamatan Setia belum berjalan dengan sempurna karena masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang jalannya program, terlebih lagi keluarga miskin yang belum terdata mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan.

Kemudian penelitian yang berkaitan dengan skripsi penulis oleh Khodizah Dkk dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam

Menangulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto". Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khodizah Dkk implementasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran pendamping yang mempunyai pekerja lain selain pendamping dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukkan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan ataupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri tanpa adanya ketergantungan kepada pemerintah. Menurut Khodizah Dkk bahwa tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk dan ibu meninggal karena melahirkan, serta masih rendahnya masyarakat yang mendukung tingkat kesejahteraan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menganalisis efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan menurut George Edward III bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan menggunakan 4 variabel yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya dengan hasil penelitian implementasikan kebijakan Program Keluarga Harapan, Komunikasi, sosialisasi di Desa Juhar dilakukan sebanyak 3 bulan sekali melalui rapat koordinasi Pemerintah desa dengan pendamping PKH sosialisasi dilakukan melalui pertemuan kelompok, Saat pertemuan kelompok masih ada penerima PKH tidak hadir dengan berbagai alasan seperti kurangnya informasi yang didapat oleh penerima PKH, selain itu aturan maupun sanksi yang kurang ketat dan kurang ketegasan oleh pendamping PKH menyebabkan

masyarakat penerima PKH tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi kewajiban sebagai penerima. Sumber daya, SDM yang melaksanakan kebijakan PKH di desa Juhar belum mencukupi, adapun SDM yang dimiliki yaitu berjumlah satu orang pendamping, sedangkan keluarga penerima PKH berjumlah 235 peserta. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendamping untuk dapat hadir dalam melakukan pertemuan kelompok. Disposisi, Pendamping PKH di desa Juhar dapat dikatakan memiliki sikap sopan kepada masyarakat penerima PKH telah dilaksanakan dengan baik. Struktur birokrasi, SOP PKH meliputi koordinasi persiapan pertemuan awal, validasi data, dan pertemuan kelompok status peserta PKH. seperti melakukan kunjungan ke pemberi pelayanan kesehatan dan mengunjungi peserta yang telah dikelompokkan.

## 2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu timbul ditengah kehidupan masyarakat sehingga membawa dampak bagi masyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik kebutuhan pangan, pendidikan sampai pemenuhan kesehatan, yang mengakibatkan rendahnya sumberdaya manusia. Tanggung jawab kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian, sektor ataupun bidang tertentu sehingga pemerintah membuat program yang proporsional. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah membuat banyak program yang mengarah kepada masyarakat kurang mampu dengan membuka akses untuk meningkatkan taraf kehidupannya terhadap kebutuhan pangan, pendidikan sampai pemenuhan kesehatan. Program Keluarga Harapan merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga sangat miskin. Misi Program Keluarga Harapan mengupayakan perubahan kehidupan masyarakat dan pola pikir keluarga peserta terhadap pendidikan dan kesehatan. Kebijakan dan misi yang baik seharusnya sesuai dengan cita-cita atau harapan yang akan dicapai.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2017) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

#### 3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan suatu laporan dan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya dengan apa yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah.

Tabel 3.1  
Jadwal Kegiatan Penelitian Dan Penulisan Skripsi

NO	KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN																															
		Mar-21				Apr-21				Mei-21				Jun-21				Jul-21				Agt-21				Sep-21				Okto-21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan																																
2	Judul ACC Judul	■																															
3	Persetujuan Pembimbing		■																														
4	Penyusunan Proposal			■																													
5	Bimbingan Proposal				■																												
6	Seminar Proposal					■	■	■	■	■																							
7	Revisi Proposal											■																					
8	Pengumpulan Data												■																				
9	Pengolahan dan Analisis Data													■	■	■	■																
10	Bimbingan Skripsi														■	■	■																
11	Pemeriksaan Buku																									■	■	■	■				
12	Meja Hijau																												■				
																													■				

### 3.3 Informan Penelitian

Menurut Bungin (2015:78) informan penelitian adalah “subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”. Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di dalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti “menentukan” informan dan bagaimanapun peneliti

“mendapatkan” informan. Menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi masyarakat di mana penelitian itu dilaksanakan. Oleh sebab itu informan penelitian ini terdiri dari:

1. Informan kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. dalam penelitian ini , penulis menggunakan informan kunci yaitu Kepala Desa dan Pendamping PKH.
2. Informan utama, merupakan mereka yang merasakan langsung program PKH dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan utama yaitu masyarakat penerima PKH, penentuan masyarakat yang akan dijadikan informan utama dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan kombinasi beberapa teknik yaitu:

#### a Wawancara

Menurut Creswell (2017:254) peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipasi, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipasi perkelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-



pertanyaan yang secara umum tidak tersruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memuculkan pandangan dan opini dari partisipan.

#### b Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan apa yang sudah berlaku melalui sumber-sumber dokumentasi. Maka dokumentasi adalah bagian penting penunjang objektivitas proses penelitian. Selanjutnya dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumentasi elektronik (rekaman).

### 3.5 Teknik Analisa Data

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Persoalan tersebut bukan menyangkut riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis, dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan.

Menurut Creswell (2017:264) langkah- langkah teknik analisis data yaitu:

- 1 Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, mencing materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

- 2 Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atau yang diperoleh dan merefrensikan makna syarat keseluruhan. Gagasan umum yang terkandung dalam perkataan partisipasi? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedelamaan, kreadibilitas, dan penuturan informasi itu? Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang yang diperoleh.
- 3 Menganalisis dengan detail dengan mengkoding data. Coding adalah proses mengelola materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf.
- 4 Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi ataupun peristiwa dalam settingan tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian. Setelah itu, terapkanlah proses coding untuk membuat jumlah kecil tema atau kategori, tema inilah yang biasanya digunakan untuk membuat judul dalam hasil penelitian. Setelah mengidentifikasi tema salaam proses coding, peneliti kualitatif dapat memanfaatkan lebih jauh tema ini untuk membuat analisis yang lebih kompleks.
- 5 Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling sering digunakan adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bias meliputi pembahasan tentang kronologi pristiwa, tema tertentu atau tentang keterhubungan antartema.
- 6 Menginterpretasikan atau memaknai data seperti “pelajaran apa yang bias diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Hal ini dapat berupa interpretasi pribadi peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya kedalam penelitian. Interpretasi juga bias berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.